



Dairi Diancam Tambang: Eksploitasi Lahan Pertanian yang Meresahkan Kehidupan

Niswatun Mufarrikah, Eka Dewi Risqianti, Syifa Amalia Geanti Cahyani, Margaretha Rizky Christiana, Paras Cahyaning Tyas, Didi Pramono

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : niswatunm15@students.unnes.ac.id, ekadewirisqianti@students.unnes.ac.id,
syifaamalia443@students.unnes.ac.id, margaretharizky@students.unnes.ac.id,
parascahya28@students.unnes.ac.id, didipramono@mail.unnes.ac.id

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: niswatunm15@students.unnes.ac.id

Abstract. *Dairi Diancam Tambang*, a documentary film produced by Yayasan Diakonia Pelangi Kasih together with Legal Aid and Advocacy of the People of North Sumatra (Bakumsu). The purpose of this writing is to study the life of the people in the villages of Bongkaras and Longkotan whose people professed as farmers after the existence of mining which affected the destruction of agricultural land and river lanes source of citizens' irrigation. This study uses library studies and methods of descriptive analysis as well as the conflict theory of Karl Marx that the struggle of the proletarians in the defense of their rights seized by the bourgeoisie. The results of the research showed that there was a conflict between the public and PT DPM regarding land management permits in the protected forest area that became the site of the underground mines, as well as public concerns about their safety due to the presence of the mining company PT D PM that is in vulnerable areas of natural disasters such as earthquakes and floods, and the expectation of the village people that the government is more attentive to how the social conditions of the people to keep the earth awake.

Keywords: *Conflict, Dairi Prima Mineral, Social Tension.*

Abstrak. *Dairi Diancam Tambang*, film bergenre dokumenter yang diproduksi oleh Yayasan Diakonia Pelangi Kasih bersama Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu). Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana kehidupan masyarakat di Desa Bongkaras dan Longkotan yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani setelah adanya pertambangan yang berdampak pada rusaknya lahan pertanian dan jalur sungai sumber irigasi warga. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan metode analisis deskriptif serta menggunakan teori konflik dari Karl Marx bahwa perjuangan kaum proletar dalam mempertahankan hak-hak mereka yang direbut oleh kaum borjuis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik antara masyarakat dan PT DPM mengenai perizinan pengelolaan tanah di kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi tambang bawah tanah, serta kekhawatiran masyarakat atas keselamatan mereka karena kehadiran perusahaan tambang PT DPM yang berada di kawasan rentan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir bandang, dan harapan masyarakat desa yaitu pemerintah lebih memperhatikan bagaimana kondisi sosial masyarakat agar bumi tetap terjaga.

Kata kunci: *Diari Prima Tambang, Ketegangan Sosial, Konflik*

1. LATAR BELAKANG

Ekspansi perusahaan ilegal terutama di sektor pertambangan dan kehutanan seringkali mengakibatkan hilangnya lahan pertanian yang signifikan. Hal ini memicu konflik dan ketegangan sosial antara masyarakat lokal yang bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka dengan perusahaan dan aparat penegak hukum. Teori konflik menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis situasi ini. Teori ini berfokus pada perebutan sumber daya dan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang mana semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam

mempunyai tuntutan dan aspirasi yang berbeda terhadap sumber daya di lokasinya masing-masing. Pentingnya agar perselisihan tidak semakin parah dan berubah menjadi kekerasan, untuk menangani masalah ini dengan cara yang efisien dan jangka panjang adalah keharusan agar memiliki tindakan yang tepat untuk dilakukan (Gaol et al., 2023)

Karl Marx sering kali menjadi fokus pembicaraan teori konflik sosial yang mana perjuangan dipandang oleh Karl Marx sebagai jenis perjuangan kelas atau pertentangan kelas. Karl Marx memperkenalkan gagasan struktur kelas dalam masyarakat dari perspektif ini. Menurut Marx, kesenjangan sosial dapat menimbulkan konflik dan revolusi sosial. Marx sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran kelompok yang berkuasa dan berada di bawah kendali dan merupakan salah satu faktor terjadinya konflik sosial. Teori Marx menyatakan bahwa persaingan kepentingan ekonomi, seperti yang diwakili oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) dan Masyarakat Dairi adalah pemicu perselisihan kelas (Fadillah, 2023).

Yayasan Diakonia Pelangi Kasih adalah salah satu produser video dokumenter Dairi Diancam Tambang. Dukungan dan advokasi bagi masyarakat Bakumsu atau Sumatera Utara. Video ini menceritakan keresahan warga Desa Bongkaras dan Desa Longkotan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, atas keberadaan perusahaan tambang bawah tanah yang berencana mengekstraksi timbal dan seng. Tujuan utama kehadiran perusahaan pertambangan seringkali adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kedatangan perusahaan tambang tersebut ditolak oleh masyarakat Dairi dengan alasan-alasan tertentu yaitu wilayah Dairi yang merupakan area patahan gempa sehingga rawan terjadi bencana seperti banjir yang pernah terjadi sebelumnya dan bahkan sampai menewaskan 6 masyarakat di desa tersebut. Dari bencana alam tersebut apakah ada jaminan bahwa mereka tidak akan terancam dan lain sebagainya?, serta masalah air pun sumbernya yang berjarak 200 meter dari pintu portal dan aktivitas tambang yang terlalu dekat dengan sumber air ditakutkan air yang ada pun akan tercemar.

PT Dairi Prima Mineral (DPM), yang terletak di lingkungan Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, bertanggung jawab atas proyek penambangan bawah tanah. Selain menyelidiki biji seng sulfida sebagai sumber daya sekunder, PT DPM juga akan menyelidiki galena, yaitu mineral yang tersusun dari perak dan timbal sulfida. NFC Hong Kong memiliki 51% saham proyek ini, sedangkan PT Bumi Resources Minerals Tbk memiliki 49%. Pada tanggal 18 Februari 1998, Pemerintah Republik Indonesia memberikan KK kepada DPM. DPM menambang mineral di lahan seluas 24.636 hektar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya. Izin operasional produksi pun diberikan oleh pemerintah Indonesia pada 8 Desember 2017.

PT Dairi Prima Mineral (DPM) justru menghadirkan risiko bencana yaitu di wilayah eksplorasi yang dinilai berpotensi rawan bencana karena sensitivitas seismik dan banyaknya patahan geologi yang mana PT DPM dalam kapasitasnya adalah sebagai pengelola tambang yang sedang membangun bendungan tailing. Masyarakat di Desa Dairi melihat adanya perubahan sosial dan lingkungan dengan hadirnya PT DPM dan masyarakat yang lebih memilih bekerja sebagai pekerja sementara yang memandang pertanian sebagai upaya terakhir telah beralih ke pekerjaan lain akibat operasi penambangan PT Dairi Prima Mineral. Selain itu, lahan pertanian pun mengalami kerusakan dan jembatan penyambung juga hancur disebabkan oleh bencana alambanjir bandang.

Pemerintah didesak oleh ribuan masyarakat dari delapan desa di Sisilima Punga-Punga agar izin PT Dairi Prima Mineral dicabut. Karena sumber pendapatan utama penduduk setempat adalah bertani dan seharusnya tambang tersebut tidak dibuka agar anak-anak mereka dapat bersekolah dikarenakan mata pencaharian mereka sebagai petani. Diharapkan desa-desa tersebut dapat menjalankan pertanian dengan damai dan tanpa rasa takut akan adanya kerusakan lingkungan sehingga menghilangkan kebutuhan akan kelangsungan terhadap perusahaan tambang tersebut. Oleh karena itu, bagaimana teori Karl Marx dapat menganalisis dan memahami konflik yang terjadi antara masyarakat Dairi dengan PT Dairi Prima Mineral?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori konflik Karl Marx, yang menekankan pada perbedaan kelas antara borjuis (pemilik alat produksi) dan proletariat (pekerja yang dieksploitasi). Dalam konteks ini, PT DPM adalah borjuis yang menguasai alat produksi dan sumber daya alam, sementara masyarakat Dairi adalah proletariat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari mereka. Marx berpendapat bahwa ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan antara kelas borjuis dan proletariat akan mengarah pada konflik sosial yang tidak dapat dihindari karena masing-masing kelas memiliki kepentingan yang bertentangan. PT DPM berusaha untuk memaksimalkan keuntungan finansial melalui eksploitasi tambang, sementara masyarakat Dairi khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan mereka seperti risiko bencana alam dan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam kesehatan dan keamanan pangan mereka. Selain itu, isu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial semakin memperparah konflik antara PT DPM dan masyarakat Dairi. PT DPM dengan akses terhadap modal dan sumber daya yang besar memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal. Ketidaksetaraan ini menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam karena keuntungan ekonomi dari aktivitas penambangan tidak terbagi secara merata.

Masyarakat Dairi merasa dieksploitasi dan terpinggirkan sementara PT DPM terus memperoleh keuntungan dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh klaim atas tanah dan hak kepemilikan, di mana masyarakat Dairi merasa bahwa tanah tersebut adalah milik mereka secara tradisional tetapi PT DPM memiliki izin operasi dari pemerintah. Konflik kepentingan ini mencerminkan teori Marx tentang distribusi kekuasaan yang tidak merata dan eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal, yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat.

Menurut penelitian Gaol, A. L., dkk (2023), Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam penanganan konflik antara masyarakat dan PT. Dairi Prima Mineral (DPM) menghadapi tantangan besar. Pemerintah daerah belum memenuhi harapan masyarakat terkait penolakan tambang PT DPM karena terbatas oleh norma hukum yang mengatur pencabutan izin lingkungan hanya jika ada cacat hukum. Konflik ini dipicu oleh perbedaan struktural, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan perbedaan kepentingan antara pertanian masyarakat dan pertambangan PT DPM. Tantangan semakin berat setelah pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 yang mengalihkan kewenangan pembuatan atau revisi AMDAL dari pemerintah daerah. Masyarakat mengajukan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup untuk tambang PT DPM, memprotes kerusakan lingkungan dan lahan pertanian, serta ancaman terhadap keselamatan warga. Pemerintah daerah diharapkan menjadi penengah antara masyarakat dan PT DPM dengan memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan pembangunan PT DPM memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, mematuhi ketentuan hukum, dan menyediakan jaminan atau asuransi bagi masyarakat yang terdampak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam tentang dampak, kondisi masyarakat, serta respon masyarakat Dairi. Kajian ini menggunakan teknik dengan menganalisis film dokumenter yang di upload channel YouTube Watchdoc Documentary yang berjudul “Dairi Diancam Tambang” yang didukung oleh kajian literatur. Lokasi pembahasan artikel ini terletak di daerah bernama Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Analisis data dilakukan pengumpulan data kemudian dikelompokkan dan disederhanakan, setelah itu diuji validitas dan reliabilitas data dan disajikan dalam bentuk

deskripsi serta penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan agar dapat menjelaskan bagaimana keadaan dan respon masyarakat Dairi terhadap perusahaan Tambang yang datang ke daerah mereka untuk membangun infrastruktur di tempat tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teori Konflik Karl Marx

PT Dairi Prima Mineral (DPM) melaksanakan proyek pertambangan seng bawah tanah di Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Indonesia. Selain menggali bijih seng sulfida, perusahaan juga mengeksplorasi galena sebagai bijih sekunder, yang mengandung timbal sulfida dan perak. Kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) justru menyebabkan potensi bencana, perusahaan tersebut berencana membangun bendungan tailing di area eksplorasi tambang yang dianggap berpotensi menyebabkan bencana gempa dan terdapat banyak patahan geologi di sekitarnya. Selain itu, pembangunan PT Dairi Prima Mineral juga menimbulkan konflik di antara masyarakat yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, kesehatan, serta interaksi dan kesatuan dalam komunitas (Gaol et al., 2023).

Konflik mengenai sumber daya alam di Indonesia seringkali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan terkait sumber daya. Menurut Karl Marx, kelompok yang berkuasa memiliki kontrol atas sumber daya dan kesempatan hidup yang tidak tersedia bagi masyarakat yang kurang mampu. Marx meyakini bahwa perbedaan ekonomi yang besar antara kelas borjuis dan proletar menyebabkan mobilitas sosial yang terbatas. Bagi Marx, masyarakat adalah tempat di mana konflik sosial terjadi, dan ia melihat peran serta lembaga sosial dan fungsi mereka melalui lensa sistem ekonomi (Omer & Jabeen, 2016).

Konflik di daerah Kabupaten Dairi tentang tambang terutama terkait aktivitas penambangan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) yaitu warga masyarakat menolak kehadiran perusahaan tambang karena khawatir terhadap aktivitas penambangan yang mungkin menyebabkan bencana alam, seperti gempa. Konflik ini juga terkait dengan kekhawatiran terhadap risiko potensial korupsi dan kemungkinan kehilangan tenaga dalam masyarakat Dairi, yang dianggap sebagai ekonomi rakyat yang telah dibangun sejak lama. Pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dairi dianggap sebagai sektor unggulan, dan warga masyarakat mengutamakan investasi yang menjaga lingkungan dan dampak manusia akibat tambang, sehingga menolak kehadiran perusahaan tambang yang tidak mengutamakan kenyamanan dan keamanan masyarakat Dairi. Masyarakat Dairi memiliki beberapa kekhawatiran tentang aktivitas penambangan yang dijalankan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM), masyarakat

merasa khawatir bahwa aktivitas penambangan yang tidak terlebih dahulu disahkan dapat mengakibatkan korupsi pada pihak yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Masyarakat Dairi khawatir dengan risiko terjadinya gempa atau bencana alam yang dapat terjadi akibat aktivitas penambangan. Masyarakat Dairi juga merasa khawatir akan risiko terjadinya kebocoran sisa limbah atau bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan kontaminasi tanah, air dan udara yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan keamanan pangan.

Konflik antara masyarakat Dairi dan PT dapat dianalisis secara rinci melalui lensa teori konflik Karl Marx. Marx memandang masyarakat dalam konteks struktur kelas yang terbagi antara pemilik alat produksi (borjuis) dan pekerja yang dieksploitasi (proletariat). Dalam konteks ini, PT DPM mewakili borjuis yang memiliki alat produksi, sementara masyarakat Dairi merupakan proletariat yang mengalami eksploitasi. Marx menyatakan bahwa konflik antara kelas-kelas tersebut tak terhindarkan karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Asumsi dari teori konflik adalah bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang saling bertentangan antara berbagai kelas sosial. Konflik sosial berasal dari distribusi yang tidak merata dari kekuasaan dan kekayaan, yang menghasilkan kesenjangan sosial. Kekuasaan ini mencakup akses terhadap sumber daya. Karl Marx mengemukakan bahwa teori konflik muncul dari beberapa gagasan dasar, termasuk konsep tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, yang saling terkait satu sama lain dalam menyusun pemahaman tentang dinamika konflik dalam masyarakat (Huwaina et al., 2024).

Dalam kasus ini, PT DPM menggunakan kekuasaannya sebagai pemilik alat produksi untuk mengambil keuntungan dari masyarakat Dairi yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan dampak negatif bagi masyarakat. Konflik antara PT DPM dan masyarakat Dairi terkait aktivitas penambangan dapat dilihat sebagai konflik antar kelas, yang berasal dari perbedaan kepentingan ekonomi. PT DPM mencari keuntungan dari aktivitas penambangan, sementara masyarakat Dairi terganggu oleh dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas ini, seperti kerusakan lingkungan dan dampak kepada sektor pertanian. Dari perspektif teori konflik, konflik antara masyarakat Dairi dan PT DPM merupakan sebuah konsekuensi dari ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan sumber daya di dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori konflik dapat memberikan wawasan yang dalam tentang dinamika konflik dalam masyarakat, serta membantu dalam mengidentifikasi akar penyebabnya dan mencari solusi yang tepat. Dalam konteks konflik tambang antara masyarakat Dairi dan PT DPM, terdapat sejumlah isu yang menjadi pemicu konflik yang dapat dianalisis melalui teori konflik Karl Marx.

Isu mengenai eksploitasi sumber daya alam di mana PT DPM sebagai pemilik alat produksi memiliki kontrol atas tambang dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat Dairi, sebagai proletariat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka dapat merasa dieksploitasi karena penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan oleh PT DPM dan bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selanjutnya, terdapat isu mengenai ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. PT DPM, sebagai perusahaan besar dengan akses ke sumber daya dan modal yang besar, memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat Dairi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian keuntungan dan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi masyarakat Dairi yang pada gilirannya dapat memperdalam kesenjangan sosial di antara mereka. Selain itu, terdapat isu mengenai hak atas tanah dan hak kepemilikan. Konflik tambang seringkali melibatkan klaim atas tanah dan hak kepemilikan, di mana PT DPM mungkin memiliki izin operasi dari pemerintah, namun masyarakat lokal termasuk masyarakat Dairi merasa bahwa tanah tersebut adalah milik mereka secara tradisional. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik hukum dan konflik kepentingan antara PT DPM dan masyarakat lokal.

Kronologi dan Penyebab

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki segudang potensi baik hayati maupun non-hayati yang tersebar ke seluruh wilayah secara merata. Sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan ini. Sektor pertambangan di Indonesia menjadi salah satu sektor untuk mendapatkan devisa negara terbesar, namun keberadaan kegiatan dan usaha pertambangan di Indonesia sendiri sering menjadi sebuah persoalan bagi berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara juga sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yakni pada Kepulauan Sumatera bagian utara tepatnya pada Kabupaten Dairi. Daerah Kabupaten Dairi mempunyai luas wilayah 191.625 Ha yaitu sekitar 2.68% dari Provinsi Sumatera Utara dengan luas 7.160.000 Ha. Kabupaten Dairi sebagian wilayahnya didapati gunung dan bukit dengan kemiringan bervariasi. Kabupaten ini berada pada ketinggian rata-rata 700- 1.250 m diatas permukaan laut. Dairi terkenal akan proyek pertambangan salah satunya pertambangan bijih seng sulfida yang terletak di Sopokomil, tak hanya itu potensi yang ada di Dairi ini seperti galena atau bentuk mineral dari timah sulfida dan juga perak.

Potensi pertambangan ini diolah dan dikembangkan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) akan tetapi sebagian besarnya adalah milik PT Bumi Resources Minerals sedangkan sisanya milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). DPM didirikan pada tahun 2010 oleh Tiongkok Cina akan tetapi tidak memiliki surat izin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pemerintah. DPM mulai melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Bukit Barisan pada tahun 2011 hingga 2014, disamping itu proses pembangunan pertambangan ini tidak memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungan dan juga mengancam mata pencaharian masyarakat lokal. Pada tahun 2014 warga Dairi mulai memproses aktivitas penambangan ilegal DPM dan pemerintah Kabupaten Dairi mengeluarkan surat peringatan kepada DPM akan tetapi DPM masih tetap beroperasi tanpa izin kembali. Sedangkan pada tahun 2017 Kementerian ESDM mencabut izin usaha pertambangan (IUP) DPM pada tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Dairi menyegel beberapa alat berat milik DPM namun usaha DPM ini tidak berhenti begitu saja mereka tetap beroperasi tanpa izin. (Gaol et al., 2023)

Dairi merupakan salah satu daerah yang rentan terjadi bencana gempa bumi karena Dairi dikelilingi gunung yang masih aktif. Masuknya DPM ini menjadikan sebuah ketidakadilan bagi masyarakat lokal yakni dengan adanya DPM ini merampas semua milik masyarakat lokal. DPM banyak menimbulkan masalah baik kepada alam di sekitar dan masyarakat lokal. Pokok permasalahan pembangunan pertambangan di Dairi ini menyebabkan banjir bandang pada tanggal 18 Desember 2018 sehingga menyebabkan korban 6 orang meninggal dunia dan juga rumah warga yang hancur. Jembatan penghubung antar wilayah pun ikut hancur karena kejadian ini sehingga masyarakat juga kram dengan adanya perusahaan DPM ini. DPM juga merampas lahan pertanian sehingga sawah untuk pertanian terganggu sehingga masyarakat juga kehilangan mata pencahariannya.

Masyarakat di sekitar lokasi tambang PT. DPM banyak yang menentang kembali dan melakukan aksi protes terhadap pembangunan tambang tersebut. Alasan utama penolakan adalah karena perusahaan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi tambang bawah tanah. Akibat penolakan dan aksi protes dari masyarakat, PT. DPM terpaksa menghentikan kegiatan pembangunan tambang dan menutup kantor mereka di lokasi tersebut. Masyarakat sudah melakukan banyak demo kepada perusahaan ilegal DPM, namun DPM menimbulkan penyebab konflik dengan tidak pernah menggubris apa yang diinginkan oleh masyarakat lokal. Pada akhirnya masyarakat Dairi sendiri bertekad sendiri untuk melakukan demonstrasi untuk berjuang mendapatkan kembali lahan pertanian mereka dengan menutup akses ke daerah pertambangan akan tetapi saat mereka sedang menutup lokasi

tersebut masyarakat dibuat geram kembali oleh pemerintah karena tidak berada di posisi masyarakat justru lebih memihak perusahaan ilegal.

Hal ini juga selaras dengan adanya teori konflik oleh Karl Marx dimana ketidakadilan dan eksploitasi ini memicu konflik antara borjuis dan proletar disini Dairi dan masyarakat lokal melakukan protes dan perlawanan terhadap pertambangan ilegal. Kesenjangan ini juga bisa dikatakan bahwa pertambangan Dairi ini dengan kaum borjuis yang diwakilkan oleh DPM dan aparat yang berkuasa sedangkan proletar adalah masyarakat yang terpinggirkan. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan lahan karena lemahnya penegak hukum, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan penegak hukum, adanya kongkalikong antara perusahaan tambang dan pejabat daerah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penambangan ilegal.

Dampak Pemicu Konflik Terhadap Perusahaan Ilegal

Dampak-dampak adanya perusahaan ilegal yang berada di Desa Bongkaras dan Longkotan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Dampak Ekonomi

Adanya *Tailing Storage Facility* atau pengolahan limbah yang dibangun dekat dengan pemukiman warga yaitu lokasi semula di kawasan hutan lindung 500 meter dari lokasi pabrik pengolahan yang kemudian di pindahkan ke Bondar Begu, Dusun Sopokomil yang berjarak 2 km dari lokasi semula. Bahkan dua ahli internasional telah meninjau dokumen Addendum ANDAL DPM dan mengatakan bahwa rancangan fasilitas bendungan tailing yang diusulkan jauh di bawah standar internasional dan standar yang disyaratkan oleh hukum Indonesia.

Warga di kawasan pertambangan sangat mengkhawatirkan potensi daya rusak pertambangan di masa mendatang terutama di lahan pertanian masyarakat. Mayoritas penduduk berprofesi petani yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan kekhawatiran penduduk yaitu semakin berkurangnya ketersediaan air untuk petani, serta pencemaran tanah akibat drainase asam tambang. Salah satu lokasi penambangan terletak di dekat sumber mata air yang merugikan jika terkena pencemaran sumber air minum masyarakat dan sumber air tanaman.

2. Dampak Sosial

Bencana pada masa eksplorasi oleh PT. DPM ini mengakibatkan kerusakan alam di sekitar desa seperti kerusakan pertanian dan perikanan warga. Bahkan sawah dan saluran irigasi warga tidak dapat digunakan karena pepohonan dan batuan yang terbawa arus banjir bandang dari Bukit Sikalombun. Di bukit tersebut terdapat camp

dan lubang bor tambang DPM yang menjadi tersangka penyebab terjadinya banjir bandang dan diketahui pula daerah tersebut rawan gempa dan banjir.

Persoalan PT. DPM di Desa Bongkaras dan Longkotan menuai kontroversi dan perlawanan dari masyarakat setempat. Proyek tersebut mengusulkan tiga kali perubahan izin lingkungan salah satunya adalah relokasi fasilitas penyimpanan bahan peledak, mengubah lokasi fasilitas penyimpanan tailing (TSF), dan lokasi pintu masuk tambang tambahan (portal). Karena Kekhawatiran warga semakin meningkat dan terdapat korban dalam kejadian banjir bandang terjadilah konflik antara warga dengan perusahaan PT> DPM

Contoh kasus yang dapat dilihat seperti konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Terdapat kegiatan pertambangan andesit yang bertujuan menjadi penyediaan material untuk pembangunan bendungan bener yang tergolong pertambangan terbuka dan dapat mengeruk hasil bumi tanpa sisa selama kurang lebih 30 bulan. Banyak warga desa yang menentang penambangan ini bukan tanpa alasan tetapi karena dapat merusak sumber air yang menghidupi mereka dan kehilangan lapangan pekerjaan dalam sektor pertanian.

3. Dampak Terhadap Lingkungan

Adanya tempat pembuangan limbah menjadi kekhawatiran warga karena pada tahun 2012 di Desa Bongkaras sempat terjadi kebocoran limbah yang mengakibatkan ikan-ikan mas budidaya warga mati, serta pencemaran terhadap air sungai hingga air konsumsi warga. Karena aktivitas pembuangan limbah yang bocor ke sungai juga berdampak pada warga sekitar hingga merenggut nyawa akibat terserang penyakit seperti malaria, demam tinggi, diare dan penyakit lainnya.

Warga di kawasan pertambangan sangat mengkhawatirkan potensi daya rusak pertambangan di masa mendatang terutama di lahan pertanian masyarakat. Mayoritas penduduk berprofesi petani yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan kekhawatiran penduduk yaitu semakin berkurangnya ketersediaan air untuk petani, serta pencemaran tanah akibat drainase asam tambang. Salah satu lokasi penambangan terletak di dekat sumber mata air yang merugikan jika terkena pencemaran sumber air minum masyarakat dan sumber air tanaman.

DPM juga meminta izin untuk melakukan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan peledak di lokasi baru dan lokasi tersebut tidak termasuk kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga Dusun Sipat, Desa Longkotan. Dalam kasus yang serupa di Zambia bahwa, “Perusahaan

pertambangan China Non-Ferrous Metals Mining Group, yang dikenal sebagai NFC, mengoperasikan tambang di Zambia. Pada tahun 2005 sebuah ledakan di fasilitas penyimpanan bahan peledak menewaskan 51 orang”. Hal inilah yang membuat warga setempat khawatir suatu ketika bahan peledak yang disimpan di gudang meledak, karena Sumatra Utara termasuk wilayah yang memiliki tingkat gempa yang sangat tinggi dan rawan banjir besar, sehingga pembangunan tersebut sangat beresiko menurut Richard Meehan, Civil Engineer - Stanford University.

Upaya Masyarakat Dairi dalam Menentang Tambang PT. DPM

Konflik yang terjadi antara masyarakat Dairi di berbagai desa dengan para penguasa tambang sejak tahun 1998 sampai tahun 2021 bahkan sampai saat ini, bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja. Para masyarakat di Dairi tentunya merasakan keresahan dan kemarahan akan kedatangan para pemilik tambang ke tempat mereka. Tidak ada komunikasi dan informasi terkait pekerjaan tambang yang mereka lakukan, mereka hanya mementingkan izin pemerintah untuk menggerus sumber daya alam yang ada di Dairi. Semakin dibiarkan begitu saja justru para pemilik tambang semakin gencar untuk membuat terowongan yang entah sampai dimana titik terowongan tersebut. Masyarakat menjadi lebih takut akan hal tersebut dapat mengancam nyawa keluarga mereka karena mereka masih mengalami trauma berat akibat banjir bandang yang menimpa mereka di tahun 2018 yang diperkirakan akibat dari banjir tersebut adalah tanah yang digerus oleh PT. DPM ini. Masyarakat setempat sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan negosiasi baik dengan kepala desa, maupun pihak pekerja lapangan tambang tersebut, namun tidak ada tanggapan dari mereka satupun.

Akhirnya beberapa masyarakat yang sudah jera dan marah dengan para pemilik tambang ini, mereka memutuskan untuk memblokir atau menutup akses para pekerja tambang yang akan menuju ke desa mereka dan yang menuju ke tempat mereka menambang atau membuang limbah hasil tambang mereka. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat masyarakat yang melakukan demo penutupan akses jalan itu di bawa oleh satpol pp dan di protes habis-habisan oleh banyak aparat seperti camat, dan polisi bahkan para pegawai PT. DPM ikut memprotes dan mencoba menghentikan tindakan masyarakat tersebut. Masyarakat semakin kecewa dengan tidak adanya pembelaan dari pemerintah setempat untuk masyarakat Dairi yang ingin memperjuangkan tempat tinggal mereka dari gerusan para pemilik tambang. Namun usaha atau upaya masyarakat tidak berhenti hanya disitu, pada tahun 2012 sebelum banjir bandang terjadi, sudah ada tragedi yang membuat beberapa masyarakat setempat merenggut nyawa akibat terserang penyakit seperti malaria, demam tinggi, diare dan penyakit lainnya yang diduga karena pencemaran air yang terjadi akibat aktivitas tambang dan limbah yang

dibuang ke sungai tempat masyarakat biasanya mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya tragedi tersebut sebenarnya masyarakat sudah melapor ke Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK) yang merupakan organisasi masyarakat sipil lokal. PDPK juga telah mencoba untuk melakukan riset terhadap air yang tercemar tersebut dengan bantuan dari Water Laboratory of the Swiss-German University (SGU) in Serpong PADA Juni 2011 dan German-Indonesian Medical Association (DIGM) pada September 2011 serta Laboratorium di Medan. Namun dengan adanya penelitian terhadap air di tiga laboratorium tersebut hanya menunjukkan hasil bahwa kematian yang dilaporkan akibat pencemaran air ini disebabkan oleh kontaminasi mikrobiologis dan kemungkinan karena tidak cukupnya pemisahan antara air limbah desa dan sumber air minum. Sehingga PDPK tidak dapat melanjutkan tuntutan terhadap PT. DPM (Simatupang, 2014).

Pada September 2021, beberapa masyarakat dengan telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat terkait dengan pembatalan tambang yang ada di Dairi ini, dan pada Januari 2022 permohonan ini diterima namun dari pihak Kementerian ESDM RI belum melakukan apa yang pemohon inginkan dan justru melakukan banding terhadap permohonan tersebut. Akhirnya PDPK juga ikut membantu dengan mengumpulkan petisi sebanyak 2200 tanda tangan yang diharapkan mampu sedikit membantu dalam mengurus izin lingkungan yang diajukan dan komplain yang diajukan oleh masyarakat setempat. Meskipun tidak secara langsung dapat mencabut izin lingkungan terhadap tambang ini tapi harapannya dapat mengurus sampai izin tersebut dapat dicabut atau dibatalkan agar kedepannya PT. DPM ini tidak dapat merusak lingkungan di Dairi lagi, mengingat bahwa Dairi merupakan wilayah yang rawan akan bencana.

Upaya memperjuangkan baik lahan tempat tinggal maupun lahan pertanian masyarakat Dairi selalu berujung dengan konflik antar masyarakat dan pemerintah setempat. Sesuai dengan teori Karl Marx tentang Konflik bahwasannya usaha atau upaya setiap kelas dalam mempertahankan hak-hak mereka akan menimbulkan beberapa konflik yang tidak akan pernah habis antara kaum proletar dengan kaum pemilik kekuasaan. Konflik yang terjadi karena upaya mempertahankan hak ini akhirnya semakin panjang karena belum ada kesepakatan yang sah untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Sampai saat ini, masyarakat Dairi di berbagai desa masih memperjuangkan tempat tinggal mereka agar tidak lebih tergerus lagi oleh tambang dari PT. DPM. Meskipun banyak upaya dari mereka yang masih tidak didengar oleh pemerintah namun mereka tidak pernah menyerah akan hak-hak mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik masyarakat Dairi dengan PT. DPM maupun dengan pemerintah merupakan sebuah konflik yang dimulai karena adanya perjuangan dari masyarakat untuk mencoba memperbaiki alam tempat tinggal mereka. Sesuai dengan penjelasan teori konflik dari Karl Marx bahwa perjuangan kaum proletar dalam mempertahankan hak-hak mereka yang direbut oleh kaum borjuis. Keadaan masyarakat Dairi yang berupaya untuk mempertahankan tempat tinggal mereka agar tidak rusak dengan adanya penggalian hasil tambang di tanah mereka tak pernah di bantu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Mereka justru mendukung para pegawai PT. DPM yang dalam penggalian tambangnya tak pernah memberikan informasi lebih lanjut dengan masyarakat setempat. Hal ini semakin membuat masyarakat marah dan semakin gencar melakukan penolakan akan izin menambang di daerah mereka terlebih bagi PT. DPM. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi di daerah Dairi dan segera mengambil tindakan rekonsiliasi baik dengan masyarakat Dairi maupun dengan PT. DPM agar bumi Dairi dapat terjaga lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Brata, N., & Pramono, D. (2020). *Relationship of Illegal Fishing Activities and Sea Resources Conservation Strategies. 1*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2290359>
- Brata, N. T., Wicaksono, H., & Pramono, D. (2020). Exploiting of Natural Resources as Livelihoods of The Border Citizens in The Sebatik Island, North Kalimantan. *Komunitas*, 12(2), 308–312. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.24392>
- Dionchi, P. H. P., Sibarani, D., Luthfianisasa, Z. N., Bararah, H., Ringga, D. P., & Pramono, D. (2022). Gerakan Masyarakat Samin Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen (Analisis Semiotik John Fiske Dalam Film “Samin Vs Semen”). *Acta Diurna*, 18(1), 77–93. http://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta_diurna/article/view/5152%0Ahttp://jos.unsoed.ac.id/index.php/acta_diurna/article/download/5152/3082
- Fadillah, N. A. (2023). Memahami Teori Sosial Karl Marx: Kelas, Konflik, dan Perubahan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2023, 5. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Gaol, A. R. L., Widodo, P., & Ichsan, M. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam Penanganan Konflik antara Masyarakat dengan PT. Dairi Prima Mineral. *Jurnal Ilmu Pemerintah Widya Praja*, 49(1), 23–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.31523246>
- Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx). *Environment Conflict*, 1(1).

- Jatam. (2020). *Tolak Pengajuan dan Pembahasan Dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL tipe A PT. Dairi Prima Mineral*. <https://www.jatam.org/tolak-pengajuan-dan-pembahasan-dokumen-addendum-andal-rkl-rpl-tipe-a-pt-dairi-prima-mineral/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Jatam. (2021). *Lokasi Tambang dan Bendungan Tailing di Patahan Gempa, Tolak Adendum Andal PT DPM*. <https://www.waspada.id/sumut/pt-dpm-sosialisasi-addendum-amdal-sebagai-bentuk-keterbukaan-kepada-publik/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Mongabay. (2023). *Kala Warga Dairi Gugat Izin Lingkungan PT DPM, Koalisi Minta Komisi Yudisial Pantau Persidangan*. <https://www.mongabay.co.id/2023/06/16/kala-warga-dairi-gugat-izin-lingkungan-pt-dpm-koalisi-minta-komisi-yudisial-pantau-persidangan/>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.
- Omer, S., & Jabeen, S. (2016). Exploring Karl Marx Conflict Theory in Education. *Bulletin of Education and Research*, 38(2), 195–202.
- Simatupang, A. (2014). Drinking water quality analysis after 22 deaths in LaeMaromas, North Sumatera. *Journal of the Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)*, 46(4), 190–197.